

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demi mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka dan bertanggungjawab. Seiring dengan adanya Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan Keuangan, Pasal 1 angka 8 yang berbunyi “Pengelolaan keuangan negara adalah berbagai kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pejabat pengelolaan keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya”. Pengelolaan keuangan negara adalah segala bentuk pengelolaan kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk segala hak dan kewajiban yang ada di dalamnya berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun di daerah.

Pengelolaan keuangan daerah adalah pengelolaan keuangan yang bertumpu atau berfokus pada kepentingan publik. Hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah alokasi anggaran yang digunakan untuk kepentingan publik dan partisipasi masyarakat. Seiring dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 1 ayat 6 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

yang berbunyi “Pengelolaan Keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Maka dari itu, pengelolaan keuangan daerah diharuskan untuk transparan dan mempunyai akuntabilitas yang tinggi sehingga tercipta pengelolaan daerah yang efektif dan efisien.

Perencanaan anggaran merupakan suatu formulasi dari proses pengelolaan keuangan dimana dalam merencanakan suatu kegiatan atau program yang akan dijalankan dapat berguna bagi masyarakat dan bisa memberikan dampak yang positif untuk semua kalangan masyarakat. Perencanaan juga dapat dinyatakan sebagai rencana kerja yang dapat dijadikan sebagai ukuran satuan moneter standar, ataupun dapat digunakan dalam anggaran jangka waktu satu tahun.

Perencanaan terlaksana dalam satu tahu anggaran, maka diharuskan adanya pelaporan atau pertanggung jawaban yang dilakukan. Seiring dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara yang berbunyi “Laporan keuangan harus disusun berdasarkan proses akuntansi yang wajib dilaksanakan oleh setiap pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran serta pengelolaan bendahara umum daerah”. Konsep keuangan tersebut dijalankan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di daerah, termasuk Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

Hasil pelaporan dari berbagai bidang di Bappelitbang maka diperoleh rekapitulasi hasil pertanggungjawaban oleh Ketua Sub Bagian Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung. Untuk pelaporan anggaran pada tahun 2017-2018 memiliki realisasi yang menginjak persentase kurang dari 95% untuk kedua tahun tersebut.

Tabel 1.1

**Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan
Kota Bandung**

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
2017	37.657.300.190	33.836.705.229	89,85
2018	39.629.337.998	34.374.539.230	86,74

Sumber: Laporan Keuangan 2017-2018 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung

Penurunan anggaran di atas harus di ketahui kenapa realisasi yang terjadi tersebut tidak menginjak pada angka 95% untuk realisasi tersebut. Faktor apa yang dapat mempengaruhi realisasi yang terjadi. Karena pada dasarnya untuk kinerja yang bisa dikatakan baik yaitu dimana secara signifikan realisasi anggaran yang terlaksana setidaknya di atas 95%, apalagi bisa lebih baik jika anggaran tersebut dapat terealisasi sepenuhnya akan lebih baik lagi.

Realisasi yang belum mencapai persentase 95% pasti ada beberapa penyebab yang terjadi, seperti contohnya dalam pelaksanaannya kegiatan yang telah direncanakan tersbet mengalami beberapa hambatan, atapun dalam pencairan dana ataupun lainnya juga mengalami beberapa hambatan, dapat juga terjadi hambatan dari sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing organisasi.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 258/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga Pasal 5 Ayat (3) dimana Sanksi yang diberikan kepada anggaran belanja yang penyerapan dan *output* kurang dari 95% maka dikenakan sanksi kementerian negara/lembaga dengan ketentuan:

- a. Tidak boleh menghambat pencapaian target pembangunan nasional;
- b. Tidak boleh menurunkan pelayanan kepada publik; dan
- c. Memperhatikan arah kebijakan penganggaran pada tahun anggaran berjalan.

Pemerintah dalam rencana tahun 2010-2014 dari Deputi Pengawasan Bidang Penyelenggaraan Keuangan Daerah melakukan penetapan dalam Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah ini juga ditetapkan guna mendukung kegiatan-kegiatan keuangan dalam ruang lingkup pemerintah daerah. Maka dari itu untuk mendorong tujuan tersebut dibuatlah Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan. Dalam

aplikasi ini pemerintahan daerah melakukan berbagai kegiatan keuangan dengan sistem yang telah disediakan.

Program aplikasi SIMDA sendiri berada dalam naungan pemerintahan daerah masing-masing, di Kota Bandung khususnya aplikasi ini telah tersistem dan diawasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Namun rekapitulasi pertanggungjawaban dari setiap dinas, dari setiap badan itu dilakukan pada organisasi masing-masing namun tersistem langsung masuk ke sistem SIMDA yang berada dalam naungan BPKAD.

SIMDA di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung sendiri telah didukung dengan adanya aplikasi tambahan seperti aplikasi SIRA (Sistem Informasi Rencana Anggaran). Aplikasi ini dibangun oleh Pemerintah Kota Bandung untuk perencanaan penganggaran daerah. Secara khusus, aplikasi ini digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan. Sementara di instansi lainnya aplikasi SIMDA belum didukung dengan sistem SIRA. Maka dari itu peneliti memfokuskan penelitian di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

Penyebab tidak efektifitasnya realisasi tersebut juga dapat disebabkan oleh perencanaan yang belum matang dalam merencanakan suatu kegiatan untuk tahun anggaran tersebut. Perencanaan di BAPPELITBANG sendiri dibuat oleh masing-masing bidang dan perencanaan tersebut langsung tersistem pada program aplikasi SIMDA. Dapat pula terjadi karena tidak efektifnya

penggunaan SIMDA untuk perencanaan anggaran pada BAPPELITBANG itu sendiri. Berdasarkan masalah tersebut maka peneliti tertarik akan meneliti dengan judul penelitian “**Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Dalam Perencanaan Anggaran Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas, maka peneliti mengidentifikasi beberapa masalah diantaranya:

1. Terdapat realisasi anggaran yang kurang dari angka 95%.
2. *Reward* atau sanksi yang di dapat ketika angka realisasi kurang dari 95%.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana ketepatan waktu dalam perencanaan keuangan pada SIMDA di setiap bidang di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung?
2. Bagaimana ketepatan perhitungan biaya perencanaan keuangan dalam SIMDA pada setiap bidang di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung?

3. Bagaimana memperhitungkan pengukuran kegiatan dalam perencanaan keuangan di setiap bidang di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung?
4. Bagaimana menentukan pilihan yang tepat untuk perencanaan keuangan dalam SIMDA pada setiap bidang?
5. Bagaimana cara menentukan pemikiran yang tepat dalam perencanaan keuangan di setiap bidang di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung?
6. Bagaimana memberikan perintah yang benar untuk perencanaan keuangan dalam SIMDA pada setiap bidang?
7. Bagaimana ketepatan penentuan tujuan dalam perencanaan keuangan di setiap bidang di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung?
8. Bagaimana ketepatan sasaran untuk perencanaan keuangan dalam SIMDA pada setiap bidang.



D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berikut ini:

1. Untuk lebih memahami bagaimana ketepatan penentuan waktu dalam perencanaan keuangan di setiap bidang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

2. Untuk mengetahui ketepatan perhitungan biaya dalam perencanaan keuangan di setiap bidang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
3. Untuk memahami bagaimana cara pengukuran suatu program dalam perencanaan keuangan di setiap bidang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
4. Untuk mengetahui cara menentukan pilihan dalam perencanaan keuangan di setiap bidang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
5. Untuk lebih mengetahui bagaimana pemikiran yang tepat dalam perencanaan keuangan di setiap bidang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
6. Untuk mengetahui bagaimana memberikan perintah dalam perencanaan keuangan di setiap bidang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
7. Untuk lebih memahami dalam penentuan tujuan dalam perencanaan keuangan di setiap bidang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
8. Untuk mengetahui ketepatan sasaran yang dibuat dalam perencanaan keuangan di setiap bidang Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini dibagi dua dalam dua jenis, yaitu:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk menilai koreksi di dalam perencanaan keuangan, dan semoga dapat menjadikannya sebagai wawasan serta diharapkan bisa menjadi bahan evaluasi dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan keuangan di tahun berikutnya pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.

2. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan yang lebih dan pengalaman yang baru bagi peneliti untuk kedepannya terhadap penggunaan SIMDA dalam perencanaan keuangan serta diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih dalam menerapkan teori yang ada khususnya mengenai Efektivitas dalam penggunaan SIMDA.

F. Kerangka Pemikiran

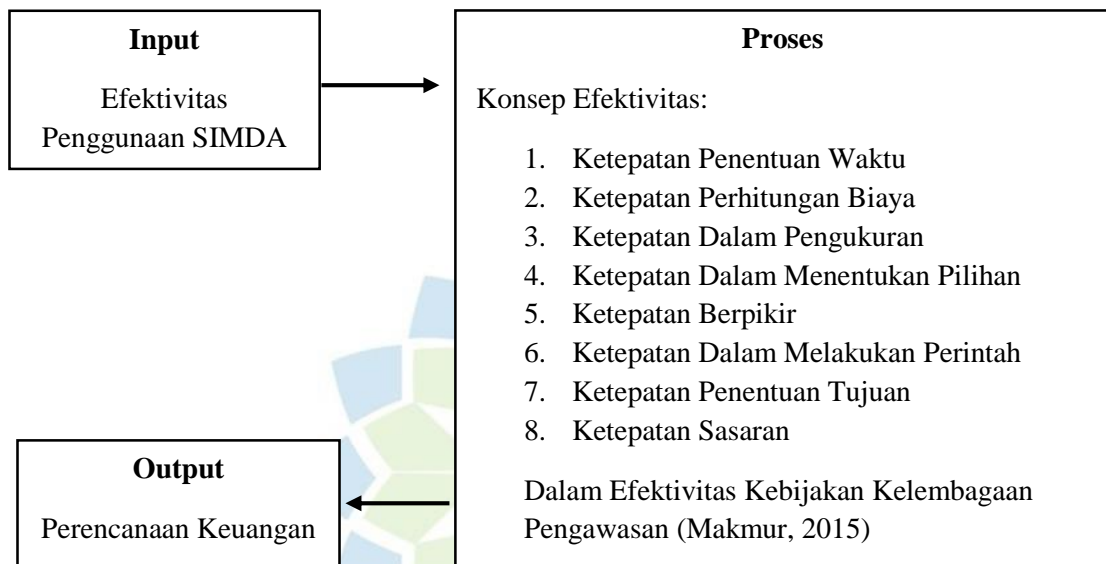
Pembahasan mengenai konsep efektivitas dalam penggunaan SIMDA terhadap perencanaan keuangan pada Bappelitbang, peneliti menggunakan teori dari Makmur. Menurut Makmur (Makmur, 2015), segi kriteria efektivitas antara lain:

1. Ketepatan Penentuan Waktu
2. Ketepatan Perhitungan Biaya
3. Ketepatan Dalam Pengukuran
4. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan
5. Ketepatan Berpikir
6. Ketepatan Dalam Melakukan Perintah
7. Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan
8. Ketepatan Sasaran.

Penggunaan teori di atas karena sangat berhubungan dengan permasalahan yang terjadi di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung. Dimana ke delapan dimensi tersebut dapat mendukung peran penggunaan SIMDA terhadap perencanaan keuangan. Menurut Subagyo dalam Budiani (2009) “efektifitas yaitu kesesuaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan. Efektifitas yaitu suatu keadaan yang terjadi sebab dikehendaki”.

Teori yang dijelaskan oleh Subagyo, teori tersebut lebih menekankan kepada tolak ukur ketepatan target program, sosialisasi program, tujuan program, dan pemantauan. Sedangkan permasalahan yang terjadi di Bappelitbang lebih tepat menggunakan teori Makmur karena teori tersebut lebih menekankan kepada efektivitas penggunaan SIMDA dalam perencanaan keuangan, dimana tolak ukurnya lebih menekankan kepada waktu, perhitungan yang tepat, pengukuran dalam perencanaan, menentukan pilihan dalam perencanaan, menuangkan pikiran dalam perencanaan, melakukan perintah

dalam perencanaan, serta menentukan tujuan yang tepat dalam perencanaan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perencanaan keuangan di Bappelitbang maka harus lebih dimaksimalkan dalam penggunaan SIMDA agar lebih efektif.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Proposisi

Uraian penjelasan kerangka pemikiran di atas, maka proposisi penelitian ini adalah Efektivitas penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah dalam Perencanaan Keuangan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung berdimensi pengukuran konsep ketepatan penentuan waktu, ketepatan perhitungan biaya, ketepatan penentuan tujuan dan ketepatan sasaran.